

PERBANDINGAN INTERPRETASI PASAL 31 UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2009 PADA KASUS KONTRAK BERBAHASA ASING DENGAN PILIHAN HUKUM INDONESIA

Abstrak

Bahasa Indonesia memiliki status sebagai bahasa resmi negara Indonesia. Sebagai bahasa resmi negara, Bahasa Indonesia sering digunakan untuk membuat suatu perjanjian. Ketentuan kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam kontrak internasional yang mengikutsertakan pihak Indonesia sering menimbulkan berbagai interpretasi akibat tidak adanya sanksi dalam rumusan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam mengenai perbandingan penafsiran hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara keabsahan kontrak berbahasa asing dengan pilihan hukum Indonesia tanpa terjemahan Bahasa Indonesia. Melalui metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, penelitian ini membedah tiga putusan monumental yang memiliki karakteristik penalaran hukum yang berbeda. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidakseragaman paradigma dimana yang pertama hakim menerapkan penafsiran gramatikal yang kaku dengan menyatakan bahwa bahasa merupakan syarat sah objektif suatu perjanjian. Kedua, terdapat penafsiran teleologis yang mengutamakan perlindungan asas itikad baik dan otonomi para pihak sehingga perjanjian dinilai tetap sah dan mengikat selama isinya tidak melanggar hukum. Ketiga, hakim menggunakan penafsiran teleologis dengan menginterpretasikan bahwa syarat bahasa sebagai kecacatan administratif formal pembuktian di persidangan yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima. Multitafsir ini memberikan ketidakpastian hukum untuk masyarakat, sehingga disamping adanya kehadiran Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, masih diperlukan penambahan sanksi akibat tidak dipatuhinya Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 guna memberikan kepastian hukum terhadap ketentuan bahasa dalam suatu perjanjian.

Kata Kunci: Penafsiran Hakim, Pilihan Hukum, Keabsahan Kontrak

Comparative Interpretation of Article 31 of Law Number 24 of 2009 in The Cases of Foreign Language Contracts Subject to Indonesian Law

Abstract

Indonesian is the official language of The Republic of Indonesia. As the official state language, Indonesia is commonly used in the drafting of agreements. However, the mandatory use of the Indonesian language in international contracts involving Indonesian parties has generated various interpretations due to the absence of explicit sanctions under Article 31 of Law Number 24 of 2009 concerning the National Flag, Language, State Emblem, and National Anthem. This study aims to conduct an in-depth analysis of the comparative legal interpretations adopted by judicial panels in adjudicating disputes concerning the validity of foreign language contracts governed by Indonesian Law that are not accompanied by an Indonesia language version. Employing normative legal research with statutory and case approaches, this study examines three landmark court decisions characterized by distinct patterns of legal reasoning. The findings reveal a lack of uniformity in judicial approaches. First, the court adopted a strict grammatical interpretation, holding that the language requirement constitutes an objective validity requirement of an agreement. Second. The court applied a strict teleological interpretation, emphasizing the principles of good faith and party autonomy, thereby maintaining that an agreement remains valid and binding as long as its contents do not contravene the law. Third, the court likewise employed a teleological interpretation by construing the language requirement as a formal administrative defect in evidentiary proceedings, resulting in the claim being declared inadmissible. These divergent interpretations create legal uncertainty for contracting parties and the public at large. Therefore, notwithstanding the issuance of Supreme Court Circular Letter Number 3 of 2023, this study argues that additional sanctions for non-compliance with Article 31 of Law Number 24 of 2009 remain necessary to ensure legal certainty regarding language requirements in contractual agreements.

Keywords: Judicial Interpretation, Choice of Law, Validity of The Contract